BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Optimalisasi hak Anak Binaan di LPKA Kelas II Muara Bulian bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemberian Hak-Hak Dasar Anak Binaan, seperti pendidikan, kesehatan, ibadah, dan perlindungan dari kekerasan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diberikan secara maksimal. Terdapat beberapa Hak Anak Binaan yang telah diberikan tetapi belum berjalan dengan optimal, seperti pada program pendidikan, buku bacaan, dan resiko dari pencampuran Anak Binaan dan Narapidana tantangan masih ada, terutama terkait keterbatasan sarana dan pencampuran Anak Binaan dengan Narapidana Pemuda/Dewasa yang dapat mempengaruhi kondisi mental anak.
2. Pelaksanaan Hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian yang belum dijalankan dengan optimal disebabkan oleh beberapa kendala. Seperti kendala dalam memberikan program pendidikan yang baik dikarenakan kurikulum yang belum jelas serta kurangnya motivasi dari anak binaan untuk belajar, serta masih bercampurnya antara Anak Binaan dengan Narapidana Pemuda/Dewasa yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan fisik dan mental Anak Binaan. Selain itu terdapat kendala utama terkait

dengan kurangnya sarana dan prasarana. Meskipun sudah ada kerjasama dengan berbagai pihak terkait, hal ini menghambat pemberian pembinaan yang optimal bagi Anak Binaan.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana agar terciptanya kurikulum yang jelas bagi sistem pembelajaran pada program pembinaan Anak Binaan, serta perlunya pemisahan secara ketat mengenai penempatan dan program pembinaan antara Anak Binaan dan Narapidana Pemuda/Dewasa untuk menghindari dampak negatif pada perkembangan psikologis dan perilaku anak.
2. Adanya aturan yang lebih tegas dan ketat yang mengatur pemisahan antara Anak Binaan dan Narapidana Pemuda/Dewasa, penulis berharap dikemudian hari terdapat aturan terkait dengan permasalahan ini dengan cara mewajibkan setiap provinsi agar memiliki Lembaga Pemasarakatan Khusus Pemuda untuk meminimalisir risiko pencampuran antara Anak Binaan dan Narapidana pemuda dan dewasa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian.
3. Kerjasama yang lebih erat dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan pemerintah daerah. Dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, diharapkan dapat tercipta program-program yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan Anak Binaan, serta memperkuat sistem pembinaan yang ada.